

PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI KASUS PADA PROVINSI DI PULAU KALIMANTAN DAN SUMATERA PERIODE 2020-2022)

Ratnawati¹, Rida Perwita Sari²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur
ridaps.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak

Salah satu konsep pembangunan daerah adalah desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah merealisasikan gagasan desentralisasi. Menurut konsep perluasan otonomi daerah, dimana daerah diberikan hak untuk menangani dan mengendalikan semua kegiatan pemerintahan selain kegiatan pemerintah pusat. Tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat pemerintahan dan besarnya kemandirian pemerintah daerah merupakan fenomena yang terjadi dengan pelaksanaan otonomi daerah. Arah penelitian ini yaitu untuk mempelajari pengaruh rasio ketergantungan fiskal dan rasio kemandirian keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera periode 2020-2022. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data berupa structural equation modeling (SEM) yang diolah dengan software WarpPLS 7.0. Populasi pada penelitian ini sebanyak 15 pemerintah provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sampel jenuh digunakan dalam penelitian ini sehingga berjumlah 45 sampel. Hasil studi ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan fiskal memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang berarti besarnya transfer daerah dari pusat membawa dampak yang besar pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan rasio kemandirian memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang berarti ketika tingkat kemandirian daerah tinggi maka tingkat kemandirian pemerintah dalam membiayai kegiatan dalam urusan pemerintahannya juga meningkat.

Kata Kunci: Rasio Ketergantungan; Rasio Kemandirian; Pertumbuhan Ekonomi

Abstract

One of the regional development concepts is decentralization. The implementation of regional autonomy embodies the idea of decentralization, according to the concept of expanding regional autonomy, where the regions are given the right to handle and control all government activities other than those of the central government. The high level of dependence of local governments on the centre of government and the amount of independence of local governments is a phenomenon that occurs with the implementation of regional autonomy. This research aims to study the effect of fiscal ratios, dependence and financial independence ratios on economic growth in provincial governments on the islands of Java and Sumatra for the 2020-2022 period. This qualitative research uses data analysis techniques in the form of a structural equation model (SEM) processed with WarpPLS 7.0 software. The population in this study were 15 provincial governments on the islands of Sumatra and Kalimantan. Saturated samples were used in this study, so there were 45 samples. This study concludes that the fiscal dependency ratio influences economic growth, which means that the amount of regional transfers from the centre significantly impact economic growth. While the independence ratio has an influence on economic growth, which means when the level of regional independence is high, the level of independence of the government in financing activities in its government affairs also increases.

Keywords: Economic Growth, Regional Financial Independence Ratio, Fiscal Dependency Ratio

PENDAHULUAN

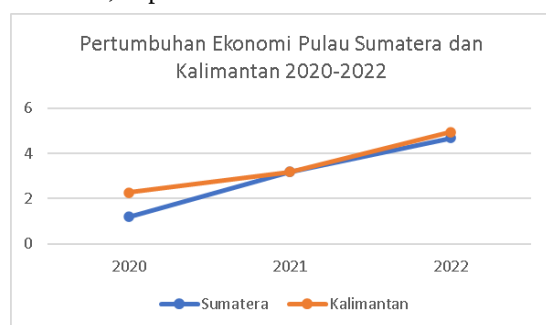
Salah satu konsep pembangunan daerah merupakan desentralisasi. Desentralisasi didefinisikan oleh UU No.32/2004 sebagai pengalihan kewenangan pemerintahan pusat kepada daerah otonom dalam rangka menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi otonomi daerah

berasal dari terwujudnya asas desentralisasi (Wibisono dan Yuliana, 2017). Menurut perluasan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan hak untuk menangani dan mengendalikan semua kegiatan pemerintahan selain kegiatan pemerintah pusat (Jahidin, 2019).

Adanya UU No.32/2004 dan UU No.33/2004 menjadi dasar hukum pelaksanaan desentralisasi fiskal, maka diharapkan terjadi perluasan kewenangan dari pemerintah daerah

serta terwujudnya peningkatan kemandirian daerah. Dengan demikian, melalui *multiplier effect* yang berbeda dari pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah diproyeksikan berfungsi sebagai perantara untuk mendorong efektivitas perekonomian dan layanan publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah memerlukan penilaian dalam mengelola pemerintahan untuk menentukan apakah pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara efisien dan efektif dengan meninjau kinerja pengelolaan keuangan daerah. Untuk menentukan apakah suatu program kerja telah dilakukan secara efisien dan berhasil, adanya indikator kinerja sangatlah penting (Mardiasmo, 2002).

Dua indikator kinerja keuangan yang dipakai dalam penelitian ini adalah rasio ketergantungan fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah. Nantinya, diharapkan kinerja keuangan pemerintah daerah akan mewakili seberapa besar kinerja pemerintah daerah tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pulau Kalimantan dan Sumatera termasuk pulau terbesar yang dimiliki Indonesia. Pada tahun 2020, adanya pandemi berdampak pada kontraksi pertumbuhan dimana Pulau Sumatera sebesar 1,19 persen dan Pulau Kalimantan sebesar 2,27 persen. Pada tahun 2021, tanda-tanda pemulihan ekonomi dari COVID-19 mulai terlihat, dimana pertumbuhan Pulau Kalimantan dan Sumatera mencapai 3,18 persen. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi semua gugus pulau cukup baik, meskipun dibayangi oleh tantangan geopolitik global akibat peningkatan keterlibatan masyarakat di era COVID-19 dimana Pulau Kalimantan tumbuh sebesar 4,94 persen dan Pulau Sumatera tumbuh sebesar 4,69 persen.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera dan Kalimantan 2020-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat merupakan fenomena yang berkembang dalam perwujudan otonomi daerah berdasarkan interaksi antara praktik pemerintahan daerah dan pembangunan. Pertumbuhan daerah, khususnya secara fisik relatif pesat, namun ketergantungan keuangan pemda

dengan pusat akibat pembangunan juga semakin meningkat. Rendahnya PAD dan tingginya Transfer Keuangan Pusat ke Daerah menunjukkan tingkat ketergantungan daerah (Patalle, 2020). Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, menyatakan bahwa pemda memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat, bahkan di tengah pandemi COVID-19 (Habibah, 2022).

Selama pandemi, kondisi ekonomi di Indonesia dapat dikatakan memburuk. Akan tetapi, ditengarai pemda tidak memiliki inisiatif mencari alternatif untuk memperbaiki kondisi ekonomi di daerahnya masing-masing, penurunan yang cukup signifikan terjadi. Hal ini diperlihatkan dengan pemerintah daerah belum memiliki andil dalam berupaya mengurangi keadaan tidak terduga yang disebabkan krisis ekonomi saat ini. Dalam rangka untuk mengkompensasi menurunnya keadaan ekonomi Indonesia, pemerintah pusat harus mengucurkan dana dari APBN. Menurut BPK, 443 pemerintah daerah dari 503 pemerintah daerah di Indonesia dinyatakan memiliki kemampuan pengelolaan yang belum mandiri. Pemerintah daerah yang belum mandiri dalam pengelolaan APBD menunjukkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah tidak berubah selama tujuh tahun terakhir (CNN Indonesia, 2021).

Sebelum dan sesudah berlakunya otonomi daerah, dapat dirasakan perbedaan dari kondisi keuangan daerah di Indonesia. Dana perimbangan keuangan, terutama transfer uang dari pusat ke daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari periode ke periode. Menurut DJPK, realisasi Transfer ke Daerah pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp784,94 triliun sedangkan pada tahun berikutnya Transfer ke Daerah mengalami sedikit penurunan sebesar Rp723,48 disebabkan karena beberapa alokasi anggaran dialihkan untuk pemulihan ekonomi dari masa pandemi COVID-19 (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020). Walaupun mengalami penurunan akan tetapi jumlah yang dialokasikan untuk Transfer ke Daerah masihlah sangat besar sehingga menunjukkan daerah-daerah di Indonesia masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap pusat.



Gambar 2. TKDD Tahun 2001-2022

Sumber: databoks.katadata.co.id (2022)

Mengingat ketergantungan akan fiskal dari pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat dalam penyelenggaraan APBD, berbagai faktor diduga menjadi akar penyebab permasalahan ini (Nugraha, 2019). Poin pertama adalah tingkat sentralisasi yang sangat tinggi dalam sistem perpajakan. Pemerintah pusat langsung mengumpulkan semua pajak yang paling produktif dan kritis. Sementara itu, pajak daerah dengan perbedaan tingkat yang sangat jauh menunjukkan yang dapat dipercaya sebagai sumber pendapatan daerah sangatlah sedikit. Dengan demikian, perlu lebih banyak ruang untuk aliran pendapatan baru atau menumbuhkan basis pendapatan daerah. Batasan ini diatur dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No.28/2009. Kedua, rendahnya partisipasi atau peran BUMD sebagai sumber pendapatan daerah. Hal ini disebabkan oleh kinerja yang buruk dan persaingan yang tinggi di antara para kontestan. Ketiga, karena daya saing pajak, masih ada persaingan sumber PAD antar pemerintah daerah. Terakhir, peningkatan DAU dianggap sebagai peningkatan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Penyakit *Coronavirus* 2019, juga dikenal sebagai COVID-19, adalah virus mengerikan yang menargetkan sistem pernapasan manusia dan menyebar dengan cepat. Untuk membatasi perkembangan COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB yang dimaksudkan untuk memitigasi dampak krisis ekonomi. Pendekatan ini membatasi interaksi sosial dengan membatasi tempat berpenduduk, termasuk kantor, rumah ibadah, sekolah, dan bahkan pusat global. Selain itu, pembatasan perjalanan diberlakukan dengan menurunkan frekuensi kegiatan melalui moda transportasi darat, laut, dan udara untuk menghindari daerah-daerah yang berpotensi menimbulkan kluster baru penyebaran COVID-19. Kebijakan PSBB memberikan dampak yang berjenjang pada sektor ekonomi yang sedang terpuruk. Pengenalan kebijakan ini memperlambat, jika tidak menghentikan, aktivitas pertumbuhan ekonomi. Menurunnya tingkat pendapatan telah menghambat konsumsi masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDB Indonesia tumbuh 2,97 persen lebih lambat *year on year* pada triwulan I tahun 2020. Pengaruh penyebaran COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2020 tidak dapat dibedakan (Ekonomi.bisnis.com, 2020).

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji terkait dampak rasio ketergantungan fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan periode 2020-2022. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah belum terdapat penelitian yang meneliti terkait rasio

ketergantungan keuangan dan rasio kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan subyek penelitian pemerintah provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan pada beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan atau jumpai di mana hanya berfokus pada satu pemerintahan daerah saja. Selain itu pada beberapa penelitian terdahulu menghitung pada beberapa jangka waktu periode tertentu sedangkan penelitian ini berfokus pada era pandemi yaitu tahun 2020 – 2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Federalisme Fiskal

Musgrave dan Musgrave (1989) menjelaskan teori federalisme fiskal menyoroti bahwa kemajuan ekonomi dapat digapai melalui desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Teori federalisme fiskal membahas hubungan antara desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat. Sistem fiskal dapat diterapkan di berbagai tingkat pemerintahan di mana tingkatan pemerintahan tersebut merupakan pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian, penerapan strategi desentralisasi fiskal akan memungkinkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan PAD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, pemerintah daerah berhak memaksimalkan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan daerah dan mengalokasikannya secara mandiri dalam rangkaian pembangunan daerah (Kusumawati dan Wiksuana, 2018).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu rangkaian ketika kekayaan negara mengalami peningkatan secara bertahap. Kemajuan pada suatu daerah menjadi tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan daerah. Menurut Sukirno (2008), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan jumlah produksi berupa barang maupun jasa dalam suatu perekonomian Negara atau wilayah. Perekonomian negara atau wilayah harus menjelaskan naiknya komoditas dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat guna meningkatkan pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perluasan kegiatan ekonomi yang mengakibatkan peningkatan produksi produk dan jasa, yang ditunjukkan sebagai bentuk peningkatan pendapatan nasional atau PDRB dari rentang waktu ke waktu berikutnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik (2022), PDRB merupakan nilai tambah bruto dari semua produk dan jasa yang

dikembangkan atau diproduksi di wilayah domestik suatu negara selama waktu tertentu, terlepas dari apakah faktor-faktor produksi tersebut dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk. PDRB dapat dihitung menggunakan tiga pendekatan: pendekatan pengeluaran, produksi dan pendapatan, semuanya diungkapkan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan pembangunan daerah yang berkelanjutan pada seluruh provinsi di Indonesia dapat diketahui apakah ekonomi makro mengalami peningkatan melalui besaran angka Produk Domestik Regional Bruto dengan pendekatan pengeluaran. Dengan demikian, pada penelitian ini nantinya akan diukur dengan tingkat PDRB pendekatan pengeluaran berdasarkan harga konstan.

Tingkat Ketergantungan Daerah

Menurut Halim (2013) menjelaskan bahwa tingkat kemampuan dan ketergantungan daerah pada subsidi pusat merupakan indikator suatu daerah dalam pelaksanaan otonomi. Perolehan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi menunjukkan bahwa rendahnya tingkat ketergantungan bantuan terhadap pusat. Ketergantungan fiskal yang rendah menunjukkan bahwa pemda mendukung tanggung jawab mereka melalui pendapatan daerah. Rendahnya ketergantungan fiskal menunjukkan bahwa pemda mampu mendanai sendiri fungsi-fungsi pemerintahannya dengan menggunakan pendapatan daerah. Dengan demikian, semakin mandiri suatu daerah, semakin tinggi pertumbuhan ekonominya. Sejalan dengan teori Federalisme Fiskal yang mengemukakan bahwa pemerintah daerah harus diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola kemampuan daerah dalam mengeksplor PAD agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga nantinya pemerintah daerah tidak lagi mengandalkan pemerintah pusat dalam urusan pembangunan daerah. Hal ini sependapat dengan temuan Yanto dan Astuti (2020) bahwa rasio ketergantungan fiskal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun terdapat juga penelitian Sari et al., (2019) yang menyebutkan bahwa rasio ketergantungan fiskal mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tingkat Kemandirian Daerah

PAD dapat mendukung operasional, layanan publik, dan pembangunan kepada individu yang telah memenuhi kewajiban dalam pajak dan retribusi kepada daerah. Aktivitas ini diproyeksikan untuk menghasilkan banyak kesempatan ekonomi baru di lingkungan sekitar masyarakat. Meningkatnya aktivitas masyarakat akan mempengaruhi volume komoditas atau jasa yang diproduksi. Akibatnya, Pemerintah Daerah harus mampu berkembang secara maksimal dengan

memanfaatkan potensi daerah. Menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu strategi untuk mendongkrak perolehan PAD. Sejalan dengan teori Federalisme Fiskal yang mengemukakan bahwa melalui rencana desentralisasi, pemerintah daerah yang diberikan wewenang agar dapat mengelola potensi daerah sehingga PAD mengalami peningkatan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Teori ini selaras dengan kajian yang dilaksanakan oleh Siregar dan Panggabean (2021), Royda dan Riana (2021), Yanto dan Astuti (2020), dan Sari et al. (2019) yang menunjukkan kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif, di mana data penelitian berbentuk angka dan statistik yang digunakan dalam analisis (R. P. Sari et al., 2022). Populasi penelitian ini sebanyak 15 pemerintah provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan Periode 2020-2022. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh sehingga sampel berjumlah 45 sampel. Jenis data penelitian ini berupa data sekunder yaitu Laporan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran dan Data Transfer ke Daerah serta LRA Pendapatan Daerah Provinsi di Pulau Kalimantan dan Sumatera tahun 2020-2022 yang diperoleh dari laman DJPK (<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>) dan BPS (<https://www.bps.go.id/site/pilihdata>). Dalam mengolah data menggunakan *structural equation modeling* (SEM) yang dijalankan dengan *software* WarpPLS 7.0. Studi ini akan menganalisis tiga algoritma menggunakan WarpPLS: algoritma untuk memperkirakan *outer model*, *inner model*, dan pengujian hipotesis.

Pertumbuhan Ekonomi

Variabel terikat dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi, diukur dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Ayu dan Septiani, 2019). Data tersebut diambil dari laman Badan Pusat Statistik berupa PDRB ADHK Menurut Pendekatan Pengeluaran Tahun 2020-2022.

Rasio Ketergantungan Fiskal

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan pendapatan transfer dibagi dengan total pendapatan daerah dari sumber lain. Semakin tinggi persentase ini mengindikasikan pemda semakin bergantung pada pusat, dan sebaliknya. Berikut ini merupakan rumus rasio untuk mengukur rasio ketergantungan daerah:

$$KKD = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun tingkat kemampuan daerah berdasarkan rasio ketergantungan sebagai berikut :

Tabel 1. Skala Ketergantungan Fiskal

Ketergantungan (%)	Kategori
0,00 – 10.00	Sangat Rendah
10.01 – 20.00	Rendah
20.01 – 30.00	Sedang
30.01 – 40.00	Cukup Tinggi
40.01 – 50.00	Tinggi
>50.00	Sangat Tinggi

Sumber: Bangga (2017)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menilai kemampuan suatu daerah dalam mendanai kegiatan operasional, layanan publik, dan pembangunan kepada individu yang membayar pajak dan retribusi kepada daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Semakin besar rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin kecil ketergantungan dengan bantuan pusat, begitu pula sebaliknya. Rasio Kemandirian daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun tingkat kemampuan daerah berdasarkan rasio kemandirian yaitu :

Tabel 2. Skala Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Derajat Desentralisasi	Kemandirian
Rendah Sekali	0% – 25%	Instruktif
Rendah	25% – 50%	Konsultatif
Sedang	50% – 75%	Partisipatif
Tinggi	75% – 100%	Delegatif

Sumber: Karenina et al. (2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Uji Validitas Konvergen

Tabel 3. Uji Validitas Konvergen

No	Variabel	Factor Loading	Ket.	P Value	Ket.
1	Rasio Ketergantungan Fiskal	1.000	Terpenuhi	<0.001	Terpenuhi
2	Rasio Kemandirian Keuangan	1.000	Terpenuhi	<0.001	Terpenuhi
3	Pertumbuhan Ekonomi	1.000	Terpenuhi	<0.001	Terpenuhi

Tabel 3 menunjukkan seluruh variabel *outer loading* memenuhi syarat yaitu nilai *outer loading* lebih dari 0,7 sehingga data tersebut valid. Selanjutnya, saat menganalisis validitas konvergen, digunakan nilai AVE; di mana validitas konvergen dianggap baik jika nilai AVE lebih signifikan dari 0,5. Berdasarkan temuan perhitungan PLS, nilai AVE adalah sebagai

berikut.

Tabel 4. Nilai AVE

Variabel	X1	X2	Y
Nilai AVE	1.000	1.000	1.000

Dilihat dari tabel 4, dapat diketahui nilai AVE ketiga variabel lebih dari 0,5 artinya telah memenuhi kriteria valid. Hal ini menandakan bahwa rasio ketergantungan fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi memiliki nilai validitas konvergen yang baik.

Uji Validitas Diskriminan

Tabel 5. Uji Validitas Diskriminan

Variabel	X1	X2	Y	Type (a)
Rasio Ketergantungan Fiskal	1.000	-0.000	0.000	Reflect
Rasio Kemandirian Keuangan	-0.000	1.000	-0.000	Reflect
Pertumbuhan Ekonomi	0.000	0.000	1.000	Reflect

Dari Tabel 5, jika nilai *cross-loading* dari semua variabel cocok dengan validitas diskriminan, maka nilai *cross-loading* dengan *loading* lebih signifikan dibandingkan dengan konstruk lainnya. Nilai akar kuadrat AVE dapat digunakan untuk mengevaluasi.

Tabel 6. Nilai Akar Kuadrat AVE

No	Variabel	Akar AVE			Ket.
		X1	X2	Y	
1	Rasio Ketergantungan Fiskal	1.000	-0.814	-0.421	Terpenuhi
2	Rasio Kemandirian Keuangan	-0.814	1.000	0.421	Terpenuhi
3	Pertumbuhan Ekonomi	-0.412	0.421	1.000	Terpenuhi

Tabel 6 menunjukkan nilai untuk tiap konstruk tersebut memiliki diskriminan yang layak dalam penelitian ini.

R-Square (R²)

Tabel 7. Nilai R-Square

R-Square	
Pertumbuhan Ekonomi	0.295

Dari Tabel 7, menunjukkan nilai *R-square* variabel terikat hanya sebesar 0.295 atau 29,5%. Artinya, variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh studi ini mencapai 29,5%, sisanya sebesar 70,5% diungkap oleh faktor-faktor di luar studi ini.

Predictive Relevance (Q²)

Tabel 8. Nilai Q-Square

Q-Square	
Pertumbuhan Ekonomi	0.326

Tabel 8 menunjukkan variabel penelitian ini memiliki nilai *Q-square* lebih dari 0 yaitu 0,326 sehingga nilai *predictive* dikategorikan relevan.

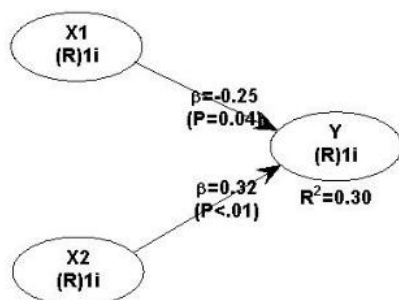
Uji Goodness of Fit

Tabel 9. Uji Model Fit

No	Model Fit	Kriteria Fit	Hasil Analisis	Ket.
1	Average Block VIF (AVIF)	Acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3	2.971	Ideal
2	Average full collinearity VIF (AFVIF)	Acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3	2.429	Ideal
3	Tenenhaus GoF (GoF)	Small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36	0.543	Large
4	Simpson's Paradox Rasio (SPR)	Acceptable if ≤ 0.7 , ideally ≤ 1	1.000	Ideal
5	R-squared contribution rasio (RSCR)	Acceptable if ≤ 0.9 , ideally ≤ 1	1.000	Ideal
6	Statistical suppression rasio (SSR)	Acceptable if ≤ 0.7	1.000	Diterima
7	Nonlinear bivarlate causality direction rasio (NLBCDR)	Acceptable if ≤ 0.7	1.000	Diterima

Dari tabel 9. menunjukkan bahwa nilai AVIF sebesar 2,971 maka dikategorikan *ideal*. Nilai AFVIF sebesar 2,429 maka dikategorikan *ideal*. Nilai GoF sebesar 0,543 dikategorikan *large*. Begitu juga SPR dengan nilai 1,000 yang dapat dikategorikan *ideal*, RSCR dengan nilai 1,000 dikategorikan *ideal*, SSR dengan nilai 1,000 yang dapat dikategorikan *ideal*, dan NLBCDR dengan nilai 1,000 yang dapat dikategorikan diterima.

Uji Hipotesis



Gambar 3. Model Uji Hipotesis

Rasio Ketergantungan Fiskal Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Era Pandemi

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis Satu

Hipotesis	Path Coefficients	P-values	Results
H1: Rasio Ketergantungan Fiskal Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi	-0.245	0.038	Ditolak

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa variabel Rasio Ketergantungan Fiskal (X1) memiliki nilai *path coefficients* -0.245 dan *p-values* 0.038. Dapat dilihat bahwa nilai *p-values* sebesar 0.038 yang berarti nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05 atau 5%. Artinya variabel Rasio Ketergantungan Fiskal (X1) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada era pandemi sehingga H1 teruji kebenarannya atau diterima.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Era Pandemi

Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis Dua

Hipotesis	Path Coefficients	P-values	Results
H2: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi	0.325	0.008	Diterima

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2) memiliki nilai *path coefficients* 0.325 dan *p-values* 0.008. Dapat dilihat bahwa nilai *p-values* sebesar 0.008 yang berarti nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05 atau 5%. Artinya variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2) memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada era pandemi sehingga H2 teruji kebenarannya atau diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Rasio Ketergantungan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Era Pandemi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) penelitian ini ditolak Artinya Rasio Ketergantungan Fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada Era Pandemi. Dengan demikian, besar-kecilnya ketergantungan keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian ini selaras dengan hasil dari Yanto dan Astuti (2020) dan Sari et al. (2019), dimana menemukan bahwa rasio ketergantungan fiskal secara substansial berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Semakin besar keterlibatan pendapatan transfer dalam pemenuhan kebutuhan fiskal, maka semakin berkurang tingkat kemandirian daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh negatif antara PAD dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa investasi pemerintah di sektor publik tidak dapat secara langsung menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik (Kusuma, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan rasio ketergantungan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi karena tingginya transfer dana membuat daerah menjadi tergantung pada pusat untuk membiayai kepentingan daerahnya, yang berarti

daerah tersebut dikategorikan belum mandiri. Otonomi daerah belum bergerak sesuai dengan kenyamanan daerah dalam mengelola keuangannya.

Dengan demikian, hasil uji ini juga mendukung teori *fiscal federalism* dimana adanya penyerahan wewenang kekuasaan kepada pemerintah daerah diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan fiskal agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih meningkat. Kemampuan daerah untuk mengembangkan anggaran fiskal untuk menutup kesenjangan fiskal dapat dengan berbagai solusi, seperti memfokuskan dan mengembangkan SDM, mengeksplor potensi daerah sehingga dapat meningkatkan PAD, serta meningkatkan fasilitas infrastruktur untuk percepatan perekonomian.

Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Era Pandemi

Semakin besar kemandirian keuangan daerah, semakin besar pula pertumbuhan ekonominya, dan sebaliknya. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H2) penelitian ini diterima. Artinya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian, besar-kecilnya kemandirian keuangan daerah membawa dampak pada besar kecilnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini selaras dengan temuan Siregar dan Panggabean (2021), Royda dan Riana (2021), Yanto dan Astuti (2020) serta G. N. Sari et al. (2019) bahwa rasio kemandirian daerah secara substansial berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Ketika pemda mempunyai PAD yang lebih tinggi, persentase kemandirian keuangan daerah juga akan lebih tinggi karena PAD merupakan aspek penting dari kemandirian suatu daerah. Adanya PAD yang tinggi akan mengindikasikan pembangunan yang cepat karena daerah akan semakin maju, dan perekonomian akan berkembang, yang berdampak pada tingginya laju pertumbuhan ekonomi. Daerah akan lebih menyadari potensi daerahnya; dengan demikian, daerah akan dapat menciptakan PAD yang berasal dari perkembangan daerah.

Selain itu, uji empiris ini mendukung teori *fiscal federalisme*, yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dengan memberikan otonomi atau kekuasaan kepada daerah-daerah yang menerapkan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi daerahnya untuk mengoptimalkan perolehan PAD sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah diatur dalam UU No. 23/2014. Adanya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, pemerintah daerah berhak memaksimalkan

kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan daerah dan mengalokasikannya secara luas dalam rangka pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan, dapat disimpulkan bahwa rasio ketergantungan fiskal memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya besarnya transfer daerah dari pusat membawa dampak yang besar pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya ketika rasio kemandirian keuangan daerah tinggi maka tingkat kemandirian pemerintah dalam urusan pemerintahannya juga meningkat. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas penggalan potensi daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Lebih lanjut, pemerintah daerah didorong untuk lebih memperhatikan tingkat kemandirian keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sehingga daerah dapat mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat.

Implikasi penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terkait rasio ketergantungan fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah provinsi Indonesia. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemda dalam perencanaan dan peningkatan PAD sehingga dapat meminimalisir ketergantungan terhadap bantuan pusat serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan ini terdapat keterbatasan yaitu perlunya penelitian yang lebih mendalam untuk memperkuat hasil kebenarannya. Data berupa LRA tahun 2022 masih berbentuk data sementara sehingga hasil penelitian masih dapat berubah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meluaskan variabel pengukuran kinerja yang mungkin berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi serta menambahkan data penelitian pada tahun 2022 yang sudah diaudit dan bukan data sementara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, P. P., & Septiani, T. (2019). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Pendapatan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(2), 184. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i2.2731>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. (2022). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gresik Menurut Lapangan Usaha 2017-2021*.
- Bangga, W. (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Ghalia Indonesia.

- CNN Indonesia. (2021). *Belum Mandiri, 88 Persen Pemda Bergantung pada Transfer Pusat*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210625113112-532-659300/belum-mandiri-88-persen-pemda-bergantung-pada-transfer-pusat>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). *Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2021*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=17307>
- Ekonomi.bisnis.com. (2020). *Parah! Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Hanya 2,9 Persen Kuartal I/2020*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200505/9/1236510/parah-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-hanya-29-persen-kuartal-i2020#:~:text=Bisnis.com%2C%20JAKARTA-Badan,tercatat minus 2%2C41%20persen>
- Habibah, A. (2022). *Sri Mulyani: Keuangan daerah masih sangat bergantung pada pusat*. Antaranews.Com. [https://www.antaranews.com/berita/2781689/sri-mulyani-keuangan-daerah-masih-sangat-bergantung-pada-pusat#:~:text=Sri%20Mulyani%3A%20Keuangan%20daerah%20masih%20sangat%20bergantung%20pada%20pusat%2C%20Jumat%2025%20Maret&text=Jakarta%20\(ANTARA\)%20-%20Menteri%20Keuangan%2C%20masa%20krisis%20pand](https://www.antaranews.com/berita/2781689/sri-mulyani-keuangan-daerah-masih-sangat-bergantung-pada-pusat#:~:text=Sri%20Mulyani%3A%20Keuangan%20daerah%20masih%20sangat%20bergantung%20pada%20pusat%2C%20Jumat%2025%20Maret&text=Jakarta%20(ANTARA)%20-%20Menteri%20Keuangan%2C%20masa%20krisis%20pand)
- Halim, A. (2013). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Jahidin, J. (2019). FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BERDASARKAN ASAS OTONOMI DAERAH SELUAS-LUASNYA. *Law Review*, 19(2), 203–221. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i2.1877>
- Karenina, S., Andayani, K. D., Aditya, I. A., & Wasil, M. (2021). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 27–41. <https://doi.org/10.26905/jrei.v2i1.6180>
- Kusuma, H. (2017). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 14(2), 101–119.
- Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(5), 2592. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i05.p12>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Yogyakarta.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill Book Company.
- Nugraha, Y. N. (2019). Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Kementerian Keuangan RI*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/%0Aartikel-dan-opini/ketergantunganfiskal-daerah-dalam-pelaksanaandesentralisasi-fiskal-di-indonesia/>
- Patalle, R. (2020). *Analisis Ketergantungan Fiskal Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja*. Universitas Hasanuddin.
- Royda, & Riana, D. (2021). Analisis Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(2), 50–64. <https://doi.org/10.30630/jam.v14i2.25>
- Sari, G. N., Kindangen, P., & Rotinsulu, T. O. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2), 1–19. <https://doi.org/10.35794/jpekd.12789.18.2.2016>
- Sari, R. P., Rizkia, N. D., Jumanah, & Bulutoding, L. (2022). *Metodologi Penelitian* (S. Bahri (ed.)). Media Sains Indonesia.
- Siregar, O. K., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio Dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Sumatera Utara (Studi Kasus Mebidangrokat). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan ...*, 11(2), 27–37. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/1154%0Ahttps://journal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/download/1154/1024>
- Sukirno, S. (2008). *Mikroekonomi: Teori Pengantar* (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Wibisono, N., & Yuliana, L. (2017). Analisis Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Pusat Pada Kabupaten / Kota Se Jawa Timur. *Ekomaks*, 1, 47–58.
- Yanto, J. K. F., & Astuti, S. (2020). Pengaruh

Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi
Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen,
Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(3),
346–357.
<https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i3.484>